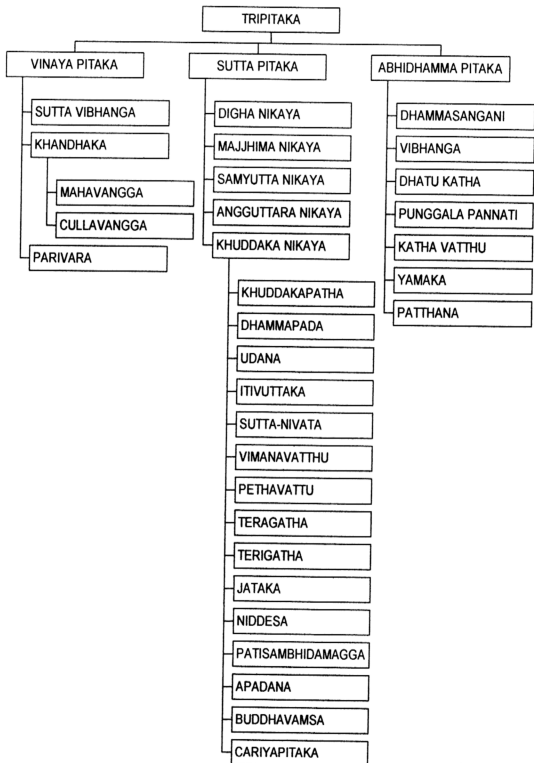


LAMPIRAN I
Rajah Kitab Suci Agama Hindu



WEDA



32. WIDYA UTAMA

LAMPIRAN III
Polisi-Pollisi Pemerintah Tentang Toleransi Agama

Lampiran III A

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan Pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan Agama;
- b. bahwa untuk pengamanan Revolusi dan ketentraman masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;
- Mengingat:** 1. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal IV aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 34);
4. Pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPRS Nomor II/ MPRS/1960;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAH GUNAAN
DAN/ATAU PENODAN AGAMA.

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Januari 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Cap / ttd.

SUKARNO

Diundangkan di: Jakarta

Pada tanggal : 27 Januari 1966

SEKRETARIS

NEGARA

cap / ttd

MOCH. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 No. 3

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS NEGARA

Kepala Bagian Perundang-undangan

ttd.

Surjantoro

**PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965**

TENTANG

**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA**

1. UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia, ia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut; Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan
 1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
 3. Persatuan Indonesia;
 4. Kerakyatan;
 5. Keadilan Sosial;

Sebagai dasar pertama Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan.

Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha national building.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Di antara ajaran-ajaran/peraturan-peraturan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi Kebathinan/Kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.
3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang membahayakan persatuan bangsa dan Negara maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal

5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketentraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.

4. Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal I - 3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 4).
5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diatunya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali di-maksudkan hendak mengganggu-gugat hak hidup Agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Dengan kata-kata “Di muka Umum” dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, shinto, Theoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebathinan, Pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/ 1960, lampiran A Bidang 1, angka 6.

Dengan kata-kata “Kegiatan Keagamaan” dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2. Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggotanya Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh Organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo pasal 169 KUHP).

Pasal 3. Pemberian ancaman Pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut dalam pasal 2.

Oleh karena aliran kepercayaan, biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana sedang pemuka aliran sendiri, yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat ideal dari tindak pidana dalam pasal ini maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4. Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a Tindak pidana yang dimaksud di sini, ialah semata mata (pada pokoknya) ditunjuk kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelompok dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal itu.

Huruf b. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, disamping mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya menghinakan sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepenuhnya.

Pasal 5, cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2726

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 01/BER/mdn-mag/1969**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN TUGAS APARAT PEMERINTAHAN
DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA
OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang:** 1. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;
2. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan melakukan pengawasan sedemikian rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam usaha, mengembangkan agama itu dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan;
3. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap, usaha pengembangan Agama dan pelaksanaan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
4. bahwa untuk itu, perlu diadakan ketentuan mengenai pelaksanaan tugas aparatur Pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya;

- Mengingat** 1. Pasal 17 ayat (3) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXVII MPRS/1996
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 319 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA.

Pasal 1

Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah membimbing dan mengawasi, agar pelaksanaan penyebaran agama dan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya tersebut:
 - a. tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama;
 - b. tidak disertai dengan intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dalam segala bentuknya;
 - c. tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu dan menggunakan pejabat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.

Pasal 3

- (1) Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka yang memberikan penerangan/penyuluhan/ceramah agama/khotbah-khotbah di rumah-rumah ibadat, yang sifatnya menuju kepada persatuan antara semua golongan masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda.
- (2) Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat berusaha agar penerangan agama yang diberikan oleh siapapun tidak bersifat menyerang atau menjelekkan agama lain.

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat Pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal Ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan:
 - a. pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat
 - b. planologi;
 - c. kondisi dan keadaan setempat.
- (3) Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat.

Pasal 5

- (1) Jika timbul perselisihan atau, pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama yang disebabkan karena kegiatan penyebaran/ penerangan/

penyuluhan/ceramah/khotbah agama atau pendirian rumah ibadat, maka Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak.

- (2) Dalam hal perselisihan/pertentangan tersebut menimbulkan tindak pidana, maka penyelesaian harus diserahkan kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang, dan diselesaikan berdasarkan hukum.
- (3) Masalah-masalah keagamaan lainnya yang timbul dan diselesaikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama segera dilaporkannya kepada Kepala Daerah setempat.

Pasal 6

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 13 September 1969

Menteri Dalam Negeri

Cap / ttd.

Amir Machmud

Menteri Agama

Cap / ttd.

KH. Moh. Dahlan

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 70 TAHUN 1978
TENTANG
PEDOMAN PENYIARAN AGAMA**

MENTERI AGAMA

Menimbang : a. bahwa kerukunan hidup antar umat beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta pemantapan stabilitas nasional dan keamanan nasional;
b. bahwa dalam rangka usah memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap usaha pengembangan dan penyiaran agama;
c. bahwa oleh karena itu perlu diatur tentang pedoman penyiaran agama.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 3 dan pasal 29;
2. Ketetapan MPR RI Nomor IY/MPR/ 1978
3. Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempumakan)

Memperhatikan: Petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1978

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYIARAN AGAMA.

Pertama : Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, teposeliro, saling menghargai, homat menghormati antar umat, beragama sesuai jiwa Pancasila.

Kedua : Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:

- a. Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain;
- b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk sesuatu agama;
- c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, bulletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain;

- d. Dilakukan dengan cara-cara masuk ke luar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

Ketiga : Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud diktum kedua, menimbulkan terganggunya kerukunan hidup antar umat beragama akan diambil tindakan sesuai, dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keempat : Seluruh Aparat Departemen Agama sampai ke daerah-daerah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan selalu mengadakan konsultasi/koordinasi dengan unsur Pemerintah dan tokoh tokoh masyarakat setempat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 1 Agustus 1978

Menteri Agama RI

Cap. ttd

H. Alamsjah Ratu Perwiranegara

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 77 TAHUN 1978
TENTANG
BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA
KEAGAMAAN DI INDONESIA**

MENTERI AGAMA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas dan ketahanan Nasional, maka kehidupan beragama perlu dibina dan diarahkan guna memantapkan kerukunan hidup intern umat beragama, kerukunan hidup antar umat beragama serta kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah;
 - b. bahwa bantuan luar negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia dalam rangka mengembangkan kehidupan beragama perlu diatur dan diarahkan agar supaya terhindar pengaruh negatif yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan hidup interen dan antar umat beragama, serta stabilitas dan ketahanan Nasional yang semakin mantap.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 dan pasal 17 ayat (3);
 2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negar;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Susunan Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (disempuniakan);
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 22 tahun 1978 tentang Pertimbangan/Rekomendasi atas Rohaniwan/Rohaniwati Warga Negara Asing yang melakukan, kegiatan di bidang agama di Indonesia.

- Memperhatikan:**
1. Sapta Krida Kabinet Pembangunan III
 2. Petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Mei 1978
 3. Hasil Pembicaraan Menteri Agama dan Pangkoksamtib tanggal 20 Mei 1978.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Bantuan Luar Negeri ialah segala bentuk bantuan berasal dari luar negeri, yang berwujud bantuan tenaga, materil dan atau finansial yang diberikan oleh Pemerintah Negara Asing, organisasi dan atau perseorangan kepada Lembaga Keagamaan dan atau Perorangan di Indonesia dengan cara apapun yang bertujuan atau dapat diduga bertujuan untuk membantu pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia.
- b. Lembaga keagamaan ialah Organisasi, Perkumpulan, Badan Yayasan dan lain-lain bentuk Lembaga Keagamaan yang usahanya bertujuan membina, mengembangkan, dan menyiarkan agama yang secara kelembagaan/institusional dikelola oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama.

Pasal 2

Bantuan Luar Negeri seperti dimaksud dalam pasal I huruf a Keputusan ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dan melalui Menteri Agama.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengembangan, penyiaran dan bimbingan terhadap umat beragama di Indonesia, maka penggunaan tenaga asing untuk pengembangan dan penyiaran agama dibatasi.
- (2) Warga Negara asing yang ada di Indonesia yang tugas pokoknya di luar bidang agama, hanya dibenarkan melakukan kegiatan di bidang agama secara insidental, setelah mendapat izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuknya.
- (3) Lembaga Keagamaan seperti dimaksud pasal I huruf b Keputusan ini dapat menggunakan Warga Negara asing untuk melakukan kegiatan di bidang agama, setelah mendapat izin dari Menteri Agama.
- (4) Lembaga Keagamaan seperti dimaksud pasal I huruf b Keputusan ini, wajib mengadakan program pendidikan dan latihan, dengan tujuan agar dalam waktu yang ditentukan tenaga-tenaga warga negara Indonesia dapat menggantikan tenaga asing yang melakukan kegiatan di bidang agama tersebut.
- (5) Program Pendidikan dan Latihan seperti dimaksud ayat (4) pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini dan selesai dilaksanakan selambat-lambatnya dua tahun setelah pelaksanaan program pendidikan dan latihan tersebut.

Pasal 4

Lembaga Keagamaan yang menerima bantuan Luar Negeri yang ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Keputusan ini dan Warga Negara Asing yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) Keputusan ini, dapat diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Direktur Jenderal Bimas Kristen Protestan, Direktur Jenderal Bimas Katolik dan Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama serta Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan Keputusan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta memberikan laporan pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 15 Agustus 1978

Menteri Agama

Cap. ttd.

H. Alamsjah Ratu Perwiranegara

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA
DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA
KEAGAMAAN DI INDONESIA**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : bahwa agar pelaksanaan pedoman penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia dapat berjalan tertib, dianggap perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk tentang tata cara pelaksanaanya.
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Perinysyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah;
 5. Keputusan Presiden, Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Departemen,
 6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1974 tentang Perubahan Lampiran Nomor 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
 7. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 81/U/ Kep/4/1967 tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Kerja sama Teknik Luar Negeri.
 8. Keputusan Presiden Nomor 59/M I Tahun 1978 tentang Pengangkatan Menteri-Menteri Kabinet Pembangunan III;
 9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor U/III/Ber/Mdn/kJag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Memperhatikan: Hasil Rapat Koordinasi Menteri-Menteri bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 19 Oktober 1978.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN INDONESIA.

Bab I

TUJUAN

Pasal I

- (1) Keputusan Bersama ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan pengaturan dan pengarahan bagi usaha-usaha penyiaran agama serta usaha-usaha untuk memperoleh dan atau menerima bantuan Luar Negeri kepada Lembaga keagamaan di Indonesia sehingga cara pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan serasi;
 - b. mengkokohkan dan mengembangkan kerukunan hidup diantara sesama ummat beragama di Indonesia serta memantapkan stabilitas nasional yang sangat penting artinya bagi kelangsungan dan berhasilnya pembangunan nasional.
- (2) Keputusan bersama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi saha-usaha pembinaan, pengembangan dan penyiaran Agama di Indonesia.

Bab II

PENGERTIAN

Pasal 2

Di dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Penyiaran Agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran sesuatu agama.
- (2) Pengawasan, adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran agama dan bantuan luar negeri.
- (3) Bantuan Luar Negeri, adalah segala bentuk bantuan berasal dari Luar Negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Negara Asing, organisasi atau perseorangan di luar negeri kepada lembaga keagamaan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia.
- (4) Lembaga Keagamaan, adalah organisasi, perkumpulan, Yayasan dan lain-lain bentuk kelembagaan lainnya termasuk perorangan yang usahanya bertujuan membina,

mengembangkan dan atau menyiarkan agama yang dari segi pelaksanaan Kebijaksanaan Pemerintah termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Departemen Agama.

- (5) Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang adalah Kepala Kantor Wilayah atau Perwakilan Departemen di Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya meliputi masalah agama.

Bab III

TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA

Pasal 3

Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadat menurut agamanya.

Pasal 4

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain, dengan cara:

- a. menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.
- b. menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.
- c. melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

Pasal 5

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga keagamaan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan pasal 4 Keputusan Bersania ini, serta lebih mencumbulkan kerukunan hidup antara sesama umat beragama.
- (2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikut sertakan Majelis-Majlis agama di daerah tersebut.

Bab IV

BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN

Pasal 6

- (1) Segala bentuk usaha untuk memperoleh dan atau penerimaan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilaksanakan dan melalui persetujuan Panitia Koordinasi Kebijaksanaan Teknik Luar Negeri (PKKTLN) setelah mendapat rekomendasi dari Departemen Agama.

- (2) Penggunaan tenaga rohaniwan asing dan atau tenaga ahli asing lainnya atau penerimaan sepla bentuk bantuan laifinya dalam rangka bantuan Luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Semua lembaga keagamaan wajib mengadakan pendidikan dan latihan bagi warga negara Indonesia untuk dapat menggantikan tenaga-tenaga rohaniwan dan atau tenaga asing lainnya yang melakukan kegiatan dalam rangka bantuan luar negeri termasuk pasal 6.

Pasal 8

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II menkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan tenaga rohaniwan asing serta warganegara asing yang membantu lembaga keagamaan di daerah;
- b. kegiatan semua lembaga-lembaga keagamaan di daerah yang bergerak di bidang pembinaan, pengembangan dan penyiaran;
- c. pelaksanaan bantuan luar negeri di bidang agama sesuai dengan maksud dan tujuan bantuan tersebut.
- d. Pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang agama serta sosial kemasyarakatan lainnya yang diadakan oleh lembaga keagamaan di daerah.

Bab V

LAIN-LAIN

pasal 9

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama dan Direktur Jendral Sosial Politik Departemen Dalam Negeri melaksanakan Keputusan Bersama ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Januari 1979

Menteri Dalam Negeri,

Menteri Agama,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. Amir Mahmud

H. Alamsjah Ratu Perwiranegara

**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : MA/432/1981

Lamp. : I (satu) berkas.

Hal : Penyelenggaraan Peringatan
Hari-Hari Besar Keagamaan.

Jakarta, 2 September 1981 M
4 Dzulkaidah 1401 H

Kepada Yth.

1. Saudara Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara di Jakarta;
2. Saudara-saudara Menteri Koordinator, Menteri, Menteri Muda Kabinet Pembangunan III dan Pimpinan Lembaga Non Departemen di Jakarta;
3. Saudara-saudara PANGKOPKAMTIB, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
4. Saudara Gubernur/Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

1. Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden R.I., pembinaan dan Pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama diarahkan agar kemurnian aqidah terpelihara, tumbuhnya suasana kerukunan yang harmonis dan terpeliharanya persatuan bangsa, sehingga kehidupan beragama dapat berkembang dengan wajar dan harmonis serta bergotong-royong dalam membangun mengamankan dan melestarikan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pada akhir-akhir ini di kalangan instansi Pemerintah, Sipil dan ABRI, badan swasta, sekolah-sekolah dan masyarakat umum, dirasakan meningkatnya penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan. Namun di beberapa tempat timbul pelbagai kesalah-pahaman dan masalah antara lain: pencampuran hal-hal yang bersifat aqidah/ajaran agama, disebabkan kurangnya pemahaman secara mendasar mengenai segi-segi aqidah/ajaran agama masing-masing.
Hal serupa itu menghambat pembinaan kerukunan hidup beragama dan mengganggu usaha pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional serta

Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Oleh karenanya hambatan tersebut perlu dihindarkan sedini mungkin.

3. Sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tertanggal 25 Agustus 1981 dan petunjuk Bapak Presiden pada tanggal 15 September 1981, bahwa peringatan hari-hari besar keagamaan pada dasarnya diselenggarakan dan dihadiri oleh para pemeluk agama yang bersangkutan; namun sepanjang tidak bertentangan dengan aqidah/ajaran agamanya, pemeluk agama lain dapat turut menghormati sesuai dengan asas kekeluargaan, bertetangga baik dan kegotong-royongan.
4. Dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan perlu dipedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Unsur peribadatan.

Unsur peribadatan ialah "ibadah" bagi Islam, "kebaktian/liturgia" bagi Kristen Protestan dan Katolik, "yadnya" bagi Hindu dan "kebaktian" bagi Budha, yang terkandung dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan merupakan bentuk ajaran agama yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemimpin/Pemuka Agama yang bersangkutan untuk mengaturnya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Dalam hal peribadatan atau adanya unsur peribadatan semacam ini, maka hanya pemeluk agama yang bersangkutan yang menghadirinya.
 - c. Unsur perayaan dan kegiatan lain ialah penyelenggaraan Peringatan hari-hari besar keagamaan yang di dalamnya tidak ada unsur ibadat. Dalam perayaan dan kegiatan semacam ini dapat dihadiri dan diikuti oleh pemeluk agama lain.
 - d. Petunjuk tentang macam-macam hari-hari besar keagamaan dan penyelenggaraan peringatannya bagi agama masing-masing tersebut dalam lampiran surat edaran ini.
5. Bila seseorang atau pejabat karena jabatannya akan hadir dalam peringatan dan upacara keagamaan dari suatu agama yang tidak dipeluknya hendaklah dapat menyesuaikan, diri, dengan bersikap pasif namun khidmat, sehingga kelancaran jalannya upacara maupun pemantapan kerukunan hidup beragama terjamin.
6. Penanggungjawab sekolah dan para guru selaku pembina anak didik tunas harapan bangsa, agar menjaga dan memelihara keyakinan dan keimanan agama yang dipeluk oleh anak didik masing-masing, sehingga penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan di sekolah-sekolah diadakan sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran ini.
7. Kepada pimpinan lembaga kemasyarakatan dan badan swasta dianjurkan untuk memperhatikan hajat keagamaan dengan memberikan kesempatan pelaksanaan ibadah dan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan di dalam Lingkungan masing-masing seperti: Rukun Kampung, Rukun Warga dan Rukun Tetangga maupun perusahaan. Untuk itu hendaknya meminta petunjuk kepada pejabat Pemerintah/Agama dan/atau pemimpin/pemuka agama setempat, agar peringatan termaksud dapat benar-benar mengembangkan kehidupan beragama serta kerukunan

antara umat beragama dalam masyarakat sesuai dengan maksud dalam surat edaran ini.

8. Biaya penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan pada dasarnya menjadi tanggungan pemeluk agama yang bersangkutan dan tidak selayaknya mengusahakan sumbangan kepada bukan pemeluknya. Namun hal ini tidak berarti bahwa seseorang dilarang memberikan sumbangan atau hadiah kepada pemeluk agama lain atas dasar suka rela dan persahabatan.
9. Bilamana dalam peringatan hari-hari besar keagamaan diundang pula pemeluk agama lain, hendaknya surat undangan dilampiri dengan susunan acara yang telah mengindahkan ketentuan tsb. nomor 4 di atas demi tertib dan lancarnya penyelenggaraan peringatan.
10. Demikianlah kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Saudara untuk menyebarluaskan pedoman di atas kepada para pejabat dan instansi dalam lingkungan kewenangan masing-masing serta masyarakat luas, dalam memberikan perhatian dan pelayanan hajat keagamaan bagi semua pemeluk agama, sehingga arah pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama dapat benar-benar memperkokoh landasan tegaknya kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila yang kita idam-idamkan.

Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Wassalam,

Menteri Agama RI.

Cap / ttd.

H. Alamsjah Ratu Perwiranegara

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1996
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KERAWANAN
KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa keberagamaan bangsa Indonesia yang meliputi bermacam suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat, budaya dan agama merupakan faktor yang potensial bagi timbulnya disintegras. Oleh karena itu setiap gejala dan kerawanan yang timbul kearah itu perlu ditangani secara dini.
- a. bahwa interaksi antar warga masyarakat yang berbeda agama perlu dibina dan ditangani secara aktif dan bijaksana.
- b. bahwa untuk memperoleh keseragaman langkah dan tindakan dalam menangani kerawanan dibidang kerukunan. hidup antar beragama perlu dikeluarkan petunjuk pelaksanaan tentang hal tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Thhun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Thhun 1994;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Thhun 1988 tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Thhun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempumakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Thhun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Thhun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
- Memperhatikan** : Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/868/X/ 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Manajemen Penanggulangan Krisis

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KERAWANAN DI BIDANG KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA.**

- Pertama** : Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Karawanan di Bidang Kerukunan Hidup Umat Beragama selanjutnya disebut Juklak Kerawanan Hidup Umat Beragama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan di Bidang Kerukunan Hidup Umat Beragama ini merupakan pedoman kerja para pejabat dan pemimpin satuan organisasi dilingkungan Departemen Agama untuk mengambil langkah-langkah dan melaksanakan koordinasi dalam mencegah dan menanggulangi kerawanan dibidang kerukunan hidup umat beragama yang terjadi.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Pebruari 1996

MENTERI AGAMA RI

ttd

Dr. H. TARMIZI TAHER

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR 84 TAHUN 1996
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KERAWANAN
DIBIDANG KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA**

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Keberagamaan bangsa Indonesia yang meliputi bermacam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, budaya dan agama merupakan faktor yang potensial bagi diintegrasikan bangsa. Berkenaan dengan itu persatuan dan kesatuan bangsa merupakan politik nasional yang strategis, karena berkaitan langsung dengan eksistensi negara Republik Indonesia.
2. Agama merupakan salah satu hak azasi manusia yang paling mendasar dan sensitif. Interaksi antar warga masyarakat yang berbeda agama perlu dibina dan ditangani secara arif dan bijaksana dengan mendorong suasana, dialogis, jujur, dan bertanggung jawab untuk memecahkan berbagai masalah yang menjadi penyebab timbulnya gangguan kerukunan hidup, umat beragama.
3. Departemen Agama sebagai lembaga Pemerintah yang bertugas mengatur tata kehidupan beragama dalam sistem kehidupan nasional, bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan setiap kerawanan yang timbul, sebagai akibat pergaulan umat beragama.
4. Untuk itu perlu suatu piranti lunak yang berwujud petunjuk pelaksanaan tentang penanggulangan kerawanan dibidang kerukunan hidup umat beragama yang mungkin timbul.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi pejabat Departemen. agama dipusat dan daerah agar senantiasa siap untuk mendeteksi dan mencegah secara dini timbulnya kerawanan, menanggulangi, maupun merehabilitasi bidang kerukunan hidup umat beragama.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup petunjuk pelaksanaan. ini adalah keadaan rawan yang terjadi dibidang kerukunan hidup umat beragama, yang mencakup tata cara pencegahan pada pra krisis dan penanggulangan purna krisis (rehabilitasi).

D. DASAR RUKUM

1. Undang-undang Nomor I/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Thhun 1988 tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Thhun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Thhun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada, Lembaga Keamanan di Indonesia;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan, dan Ibadat Agama Pemeluk-pemeluknya;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keamanan di Indonesia;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
8. Intruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama didaerah sehubungan dengan telah terbentuknya wadah musyawarah antar umat beragama;
9. Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tanggal 2 September 1981 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan.

E. PENGERTIAN

1. Aman, adalah suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat dimana administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan dapat berfungsi dengan baik;
2. Rawan, adalah suatu keadaan yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama, yang antara lain ditandai dengan timbulnya keresahan-keresahan sosial.
3. Gawat, suatu keadaan yang dimana keresahan sosial menjadi menjadi ketegangan sosial akibat dari gangguan terhadap kerukunan hidup umat beragama yang disertai berbagai isu-isu, aksi-aksi, keberingasan sosial yang mengganggu atau mengancam stabilitas nasional.
4. Huru-hara, adalah tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh sekelompok massa secara bersama-sama atau terbuka dalam bentuk ancaman kekerasan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Konflik, adalah suatu persengketaan antara dua pihak atau lebih akibat perbedaan kepentingan;
6. Krisis Kerukunan Hidup Umat Beragama, adalah suatu keadaan gawat/darurat yang mengancam stabilitas nasional dan integritas bangsa sebagai akibat dari adanya konflik terbuka antara dua pihak yang bersengketa, maupun antara umat beragama dengan pemerintah, disertai dengan tindakan anarki, kekerasan, dan pelecehan hukum, baik yang mendadak maupun eskalatif;
7. Penodaan Agama, seseorang atau kelompok/golongan yang sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama lain yang menyimpang dari pokok-pokok agama itu;
8. Manajemen penanggulangan kerawanan dibidang kerukunan hidup umat beragama, adalah suatu sistem yang mengatur langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian tentang tata cara pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi terhadap keadaan luar biasa yang terjadi dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama.

F. SISTEMATIKA

Petunjuk pelaksanaan ini disusun dan ditetapkan dengan sistematika

I. Pendahuluan

II. Kerawanan dibidang kerukunan hidup umat beragama

III. Upaya penanggulangan kerawanan

IV. Penutup

II. KERAWANAN DI BIDANG KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA

A. HAKIKAT KERAWANAN

Kerawanan dibidang kerukunan hidup umat beragama pada hakikatnya adalah suatu persengketaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan masalah-masalah keagamaan, baik interen umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan Pemerintah yang menjurus pada konflik terbuka dan tindakan-tindakan anarki dengan ciri kekerasan fisik serta pelecehan hukum.

Apabila keadaan tersebut dibiarkan berlangsung, dapat mengganggu stabilitas nasional dan integritas bangsa. Kerawanan dapat terjadi secara mendadak ataupun bertahap/eskalatif, umumnya terjadi tindakan yang sifatnya spontan.

B. PENYEBAB KERAWANAN

Kegiatan keagamaan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, antara lain adalah :

1. Pendirian tempat ibadah

Tempat ibadah didirikan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat sering menciptakan ketidak harmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama.

2. Penyiaran agama

Penyiaran agama, baik secara lisan, melalui media cetak seperti brosur, famplet, selebaran dan sebagainya, maupun media elektronika, serta media yang lain dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih yang ditujukan kepada orang yang telah memeluk agama lain.

3. Bantuan Luar Negeri

Bantuan dari Luar Negeri untuk pengembangan dan penyebaran suatu agama baik yang berupa bantuan materi, finansial ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang ada, dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama baik interen umat beragama yang dibantu, maupun antar umat beragama.

4. Perkawinan Berbeda Agama

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, walaupun pada mulanya bersifat pribadi dan konflik antar keluarga sering, sering

mengganggu keharmonisan dan kerukunan hidup umat beragama lebih-lebih apabila sampai kepada akibat hukum dari perkawinan tersebut atau terhadap harta benda perkawinan, warisan dan sebagainya.

5. Perayaan Hari Besar Keagamaan

Penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan yang kurang mempertimbangkan kondisi dan situasi serta lokasi dimana perayaan tersebut diselenggarakan dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.

6. Penodaan Agama

Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai ajaran dan keyakinan suatu agama tertentu yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.

7. Kegiatan Aliran Sempalan

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan dan menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama, dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup beragama.

8. Aspek Non Agama Yang Mempengaruhi

Aspek-aspek non agama yang dapat mempengaruhi kerukunan hidup umat beragama antara lain : kepadatan penduduk, kesenjangan sosial ekonomi, pelaksanaan pendidikan, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala regional maupun internasional, yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan agama.

III. UPAYA PENANGGULANGAN KERAWANAN

A. PENCEGAHAN

Mencegah timbulnya kerawanan merupakan upaya yang terbaik, karena dapat memberikan ketenangan, kedamaian, dan kesejukan kepada, umat beragama untuk dapat melaksanakan ajaran agamanya.

Untuk menciptakan kondisi yang demikian harus diusahakan sejak dini melalui bimbingan dan pembinaan kerukunan hidup beragama oleh jajaran Departemen Agama, baik di pusat maupun di daerah.

Bimbingan dan pembinaan sebagai upaya mencegah timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama tersebut antara lain :

1. Penyuluhan dan pemasyarakatan peraturan perundangan terutama yang berhubungan dengan pembinaan tata kehidupan beragama seperti:

- a. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri No.01/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan tugas Aparat Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya.

- b. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979/1 tahun 1979 tentang Tata cara penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman penyiaran agama.
- d. Keputusan Menteri Agama No.77 tahun 1978 tentang Bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia.
- e. Surat Edaran Menteri Agama No.MA/432/1981 tanggal 2 September 1981 tentang Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan.

2. Perumusan kode etik pergaulan umat beragama

Kode etik pergaulan umat beragama mempunyai peranan penting bagi upaya membina kerukunan hidup umat beragama. Melalui kode etik seorang pemeluk suatu agama dapat memahami bagaimana bersikap terhadap orang lain yang berbeda agama. Berbagai kebijaksanaan pemerintah dibidang ini pada hakekatnya merupakan rintisan untuk mewujudkan kode etik pergaulan umat beragama tersebut.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Kakanwil Dep. Agama Propinsidan Kakandep Agama Kabupaten/Kodya bersama-sama dengan pemuka agama setempat membuat kesepakatan-kesepakatan untuk melaksanakan kebijaksanaan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dibidang kerukunan umat beragama beserta pengembangannya didaerah masing-masing.
- b. Kesepakatan tersebut dirumuskan melalui forum musyawarah, dialog, sarasehan, tatap muka dan sebagainya antara pemuka-pemuka agama dengan pemerintah. Kesepakatan-kesepakatan tersebut akan lebih baik apabila direkomendasikan oleh Gubemur/Kepala Daerah Tk. I atau Bupati/Kepala Daerah Tk. II atau Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi atau Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kotamadya.
- c. Memasyarakatkan kesepakatan-kesepakatan tersebut kepada seluruh umat beragama dan pejabat-pejabat pemerintah melalui media yang ada sampai tingkat Desa/Kelurahan.

3. Membina dan memupuk sikap hidup rukun.

Sikap dan perilaku hidup rukun yang telah mengakar dan membudaya dikalangan warga masyarakat hendaknya dibina dan dipupuk dengan menerapkan kode etik pergaulan umat, beragama. Upaya membina dan memupuk sikap hidup rukun tersebut dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan kerjasama sosial kemasyarakatan, kegiatan bantuan umat beragama dan forum-forum kegiatan lain yang melibatkan umat beragama.

4. Pembentukan kader kerukunan hidup umat beragama

Setiap satuan organisasi Dep. Agama di Propinsi dan di Kabupaten/Kotamadya hendaknya membentuk dan membina kader-kader kerukunan hidup umat beragama yang terdiri dari para pemuda-pemuda wakil dari Majelis-majelis agama, dan Tokoh-tokoh agama.

Kader-kader kerukunan tersebut hendaknya selain mampu mengerti, memahami dan menghayati kerukunan hidup beragama hendaknya juga mampu menjadi motivator, dinamisator, dan stabilitator masyarakat dalam membina kerukunan hidup umat beragama.

5. Forum pertemuan pemuka agama

Dalam rangka pembinaan kerukunan hidup beragama, perlu diselenggarakan forum pertemuan tatap muka antara pemuka-pemuka agama dengan pemimpin satuan Organisasi Dep. Agama di Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya secara berkala. Forum pertemuan tersebut dapat berwujud forum dialog, musyawarah, silaturahmi, sarsehan dan sebagainya sebagai forum untuk saling tukar informasi, konsultasi dan sebagainya.

B. PENANGGULANGAN KERAWANAN

Apabila upaya Penanggulangan kerawanan telah dilakukan secara optimal tetapi tetap terjadi keadaan luar biasa (kerawanan), maka tindakan yang dilakukan adalah kerawanan tersebut dengan cepat, tepat dan arif, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sepanjang masih dalam, tingkat kerawanan, yakni pra krisis dan purna krisis, penanggulangan dilakukan oleh aparat Departemen Agama dibantu oleh instansi terkait dan aparat hankam.
2. Apabila, sudah masuk dalam keadaan krisis, penanggulangan dilakukan oleh aparat keamanan (ABRI) berdasarkan Keputusan Pangab Nomor : Skep 868/X/1994 Juklak manajemen penanggulangan krisis dibantu oleh aparat Dep. Agama dan Instansi terkait.
3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab aparat Dep. Agama, dalam menanggulangi kerawanan tersebut diatur sebagai berikut:

a. Kepala KUA Kecamatan, Kepala MIN, Kepala MTsN dan Kepala, MAN.

- 1) Apabila melihat, mendengar atau mengetahui telah terjadi kerawanan dibidang kerukunan hidup beragama, segera turun kelapangan untuk mengidentifikasi kerawanan itu; apa masalahnya, dimana terjadi, waktu kejadian, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam kerawanan tersebut.
- 2) Berusaha menormalisir keadaan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab selaku aparat Departemen Agama Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Tripika setempat. hasil identifikasi dituangkan dalam laporan singkat, ditanda tangani oleh Kepala/Wakil atas nama jabatan kemudian dikirimkan kepada kepala Kepala Kandepag Kabupaten/Kotamadya masing-masing dan tembusannya dikirim kepada Kepala Kanwil dengan Facsimile (melalui Wartel terdekat).

b. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kotamadya

- 1) Setelah menerima laporan dari Kepala KUA, MIN, MTsN dan Kepala MAN atau mendengar, menyaksikan, dan mengetahui kejadian itu segera turun kelapangan untuk mengidentifikasi kerawanan tersebut apa masalahnya, dimana tempat, waktu

kejadian apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam kerawanan tersebut.

- 2) Mengatasi keadaan tersebut berdasar kebijaksanaan Pemerintah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku aparat Dep. Agama. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Bupati/ Kepala, Daerah, atau Walikota Madya dan Musypida setempat serta instansi terkait.
- 3) Berusaha untuk melokalisir agar kerawanan itu tidak meluas kedaerah lain baik fisik maupun non fisik.
- 4) Melaporkan dengan segera kejadian itu kepada Kepala Kanwil dengan facsimile melalui wartel terdekat kemudian diikuti dengan pengiriman tertulis melalui Pos atau melalui jasa pengiriman tercepat yang ada dengan caraka khusus.
Apabila dipandang perlu dapat mengirim langsung ke Departemen Agama, Jakarta dengan Facsimile kepada salah satu Nomor Facsimile berikut ini:
 - Kepada Sekretaris Jenderal Nomor Fac:021-3800177
 - Kepada Inspektur Jenderal Nomor Fac:021-3140135Sehubungan dengan itu, Kepala Kanwil agar selalu membuka Facsimile selama 24 jam.
- 6) Ketua PA, Dekan Fakultas, dan Direktur Akademi Pendidikan Agama Kristen yang berkantor di Kabupaten/Kodya setempat yang mengetahui dan mendengar telah terjadi kerawanan dibidang kerukunan hidup umat beragama agar memberitahukan kepada Kepala Kandepag dengan segera untuk mendapatkan penanganan dan penanggulangan sesuai petunjuk diatas.

c. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi

- 1) Setelah menerima laporan dari Kepala Kandepag, Kabupaten/Kodya atau Mengetahui kerawanan tersebut, segera turun kelapangan untuk mengidentifikasi; apa masalahnya, waktu dan tempat kejadian, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam kerawanan itu.
- 2) Berusaha Untuk mengatasi kerawanan itu berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku aparat Departemen Agama.
- 3) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Musypida setempat.
- 4) Berusaha untuk melokalisir kejadian tersebut agar tidak meluas baik secara fisik maupun non fisik.
- 5) Melaporkan kejadian tersebut dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasinya kepada Menteri Agama melalui Facsimile kepada salah satu. nomor Facsimile berikut:
 - Sekretaris Jenderal Nomor Fac 021- 3800177
 - Inspektur Jenderal Nomor Fac 021 - 314013 5Kemudian diikuti dengan pengiriman laporan lengkap melalui Pos Kilat atau jasa pengiriman, jasa tercepat yang ada.
Penanganan selanjutnya pada tingkat Departemen akan dilakukan oleh Koordinator Wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 6) Rektor IAIN, Ketua PTA, dan Direktur APGAH di Bali yang mengetahui atau mendengar telah terjadi suatu kerawanan agar segera memberitahu

kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi untuk mendapatkan penanganan dan penanggulangan sesuai dengan petunjuk diatas.

d. Penanganan oleh Pejabat Eselon I Pusat

- 1) Penanganan semua kasus keagamaan di Kantor pusat Dep. Agama dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I Pusat dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - a) Semua kasus keagamaan yang terjadi di wilayah pulau Jawa ditangani Sekretaris Jenderal selaku Koordinator Wilayah Jawa.
 - b) Semua kasus keagamaan yang terjadi di wilayah Sumatera ditangani oleh Inspektur Jenderal selaku Koordinator Wilayah Sumatera.
 - c) Semua Kasus keagamaan yang terjadi di wilayah pulau Kalimantan ditangani oleh Kepala Badan Litbang Agama selaku Koordinator Wilayah Kalimantan.
 - d) Semua kasus keagamaan yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara ditangani oleh Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji selaku Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
 - e) Semua kasus keagamaan yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya ditangani oleh Dirjen Bimas (Kristen) Protestan selaku Koordinator wilayah Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya
 - f) Semua kasus yang terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat ditangani oleh Dirjen Bimas Hindu dan Budha selaku Koordinator Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.
 - g) Semua kasus keagamaan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur ditangani oleh Direktur Jenderal Bimas Katolik selaku Koordinator Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
- 2) Pejabat Eselon I tingkat pusat setelah mendengar dan menerima, laporan dari Kakanwil dan atau tembusan dari Kakandep, bahwa telah terjadi suatu kerawanan di suatu Daerah segera memberi petunjuk cara penyelesaian kerawanan tersebut dan melaporkan kepada Menteri Agama tentang kerawanan yang terjadi serta langkah yang sudah diambil.
- 3) Apabila untuk menyelesaikan suatu kasus diperkirakan perlu keterlibatan instansi lain penyelesaian tersebut diselesaikan secara terkoordinasi.
- 4) Untuk melokalisir dan mengatasi kerawanan pada suatu daerah, press release agar tidak dilakukan oleh suatu kerja kehumasan ditingkat Departemen.
- 5) Semua satuan organisasi baik ditingkat pusat maupun di daerah (Sekjen, Ditjen, Badan Litbang Agama, Kanwil Depag Prop, Kandepag Kab/ Kodya, dan KUA Kecamatan) agar mendokumentasikan setiap kerawanan yang ada (dengan mapping system) dengan cara-cara penyelesaian untuk menjadi acuan bagi pejabat berikutnya.

e. Penanggulangan purna krisis

1. Penanggulangan kerawanan yang terjadi pada purna krisis konsolidasi, bimbingan dan pembinaan kembali serta penciptaan situasi agar tenang kembali.
2. Penanggulangan sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan oleh Kepala Kantor Dep. Agama Kabupatemen/ Kotamadya apabila kerawanan itu terjadi

di Kabupaten/ Kotamadya atau oleh Kepala Kantor Wilayah apabila kerawanan terjadi ditingkat Propinsi/DKI, DIY, atau Timor Timur.

3. Upaya konsolidasi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Dep. Agama bersama-sama dengan pimpinan umat beragama setempat, sekurang-kurangnya dengan pimpinan umat beragama terkait dengan peristiwa tersebut.
4. Apabila dalam melakukan konsolidasi diperlukan keikutsertaan instansi lain, Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Dep. Agama hendaknya mengusahakan keikutsertaan instansi lain tersebut.
5. Konsolidasi diarahkan agar terwujudnya situasi tenang kembali seperti sediakala. Untuk mewujudkan situasi tersebut diusahakan agar komonikasi interen umat dan antar umat beragama dapat berjalan kembali, kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara kembali pulih dan berjalan biasa.
6. Apabila kegiatan konsolidasi telah dilaksanakan, kemudian dilaporkan kepada Menteri Agama melalui saluran Hirakhi sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan d

IV. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai pedoman, dimasyarakatkan, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta dijabarkan oleh seluruh satuan organisasi dan satuan kerja dilingkungan Departemen Agama sesuai dengan kondisi dan perkembangan situasi yang dihadapi dilingkungan masing-masing.

Jakarta, 28 Februari 1996

MENTERI AGAMA RI

ttd

Dr. H. TARMIZI TAHER

**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1979**

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP
BERKEMBANGNYA ISSUE-ISUE YANG DAPAT MEMECAH
BELAH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
KHUSUSNYA YANG MENYANGKUT KEAGAMAAN**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan sering terjadinya kerusuhan massa pada akhir-akhir ini di beberapa daerah seperti di Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Sanggau, Ledo, Pontianak dan Rancaokek-Bandung, yang semula disebabkan oleh masalah sepele, kemudian berkembang menjadi kerusuhan massa yang menjurus kepada masalah SARA khususnya masalah keagamaan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. bahwa guna menghindari timbul dan berkembangnya kerusuhan massa di wilayah Indonesia lainnya perlu adanya upaya-upaya pencegahan dengan peningkatan kewaspadaan oleh seluruh aparat Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Untuk itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Menteri Agama tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap berkembangnya issue-issue yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya yang menyangkut masalah keagamaan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1996.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

MENGINTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Agama
4. Kepala Badan Litbang Agama
5. Para Rektor IAIN seluruh Indonesia
6. Para Kepala Kanwil Departemen Agama seluruh Indonesia.

7. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.
8. Para Kepala Kantor Departemen Agama seluruh Indonesia.
9. Para Kepala Kantor Urusan Agama seluruh Indonesia.

Untuk

- Pertama :**
1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan timbulnya issue-issue yang berkembang di masyarakat yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya yang menyangkut masalah keagamaan.
 2. Melakukan pembinaan baik kedalam maupun keluar secara intensif dan terkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Dengan titik berat pembinaan terutama sekali agar ditekankan pada kepatuhan dalam mentaati ketentuan-ketentuan/peraturan keagamaan yang berlaku seperti peraturan tentang pendirian tempat ibadah. Penyebaran/ penyiaran agama, penggunaan pengeras suara di tempat ibadah dsb.
 3. Membantu aparat keamanan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban guna mencegah terjadinya kerusuhan massa. khususnya yang disebabkan oleh issue-issue keagamaan.
 4. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan agama, baik agama Islam maupun agama lainnya agar tidak keluar atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apabila diketahui adanya penyimpangan sekecil apapun agar segera mengkoordinisasikan dengan pihak keamanan setempat dan melaporkan kepada pimpinan.
 5. Melaporkan dengan segera berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat sekecil apapun kejadiannya yang diperkirakan akan dapat menimbulkan gejolak dan keresahan pada masyarakat. Laporan disampaikan kepada masing-masing Koordinator Wilayah sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 350 Tahun 1996, yaitu :
 - a. Seluruh Wilayah Sumatera kepada Inspektur Jenderal Departemen Agama;
 - b. Seluruh Wilayah Jawa kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji;
 - c. Seluruh Wilayah Kalimantan kepada Kabalitbang Agama;
 - d. Seluruh Wilayah Sulawesi kecuali Sulawesi Utara) dan Nusa Tenggara Barat kepada Dirjen Binbaga Islam
 - e. Wilayah Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya kepada Dirjen Bimas Kristen Protestan.
 - f. Wilayah NTT dan Timor Timur kepada Dirjen Bimas Katolik;
 - g. Wilayah Bali kepada Dirjen Bimas Hindu dan Budha
 Kedua Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Pebruari 1997

MENTERI AGAMA RI

Cap/ttd

Dr. H. TAMIIZI TAHER

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri
4. Ketua Bakorstanas Pusat;
5. Para Kepala Biro/Direktur/Sekretaris/Kapuslitbang Agama/ Kapusdiklat
Pegawai di lingkungan Departemen Agama,
6. Badan Dokumentasi Biro Hukum dan Humas Dep. Agama.

**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1980**

TENTANG

**BIMBINGAN AJARAN ISLAM DAN PEMBINAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan pementapan terhadap Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila perlu dijaga keutuhan dan kelestarian alam Indonesia;
- c. bahwa untuk mencapai maksud huruf a di atas perlu dilakukan peningkatan bimbingan ajaran Islam dan pembinaan Lingkungan hidup;
- d. bahwa untuk merealisasi maksud dan tujuan sebagaimana huruf a, dan b, di atas perlu dilakukan pengarah dan bimbingan.

- Mengingat** : 1. Pasal 29 Undang-Jndang Dasar 1945;
2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
3. Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
4. Ketetapan MPR-RI Nomor IY/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.

- Memperhatikan** : Keputusan Bersama Menteri Agama RI, M.U.I., dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup tanggal 14 Agustus 1979.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi di seluruh Indonesia;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia,

- Un tu k** : 1. Mengusahakan semaksimal mungkin bimbingan ajaran Islam dan pembinaan lingkungan hidup melalui T.V.R.I., R.R.I/Non-R.R.I/ Radio Siaran Pemerintah Daerah, Ceramah-ceramah/ Khutbah-khutbah dan berbagai

kesempatan lainnya demi terwujudnya pelestarian alam dan lingkungan hidup.

2. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Melaporkan hasil Instruksi ini kepada atasannya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 24 Nopember 1980

A.N. Menteri Agama RJ.
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
Dan Urusan Haji

Cap/ttd.

H.A. Burhani Tjokrohandoko.

**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1981**

TENTANG

**BIMBINGAN AJARAN AGAMA (KRISTEN) PROTESTAN
KATOLIK, HINDU DAN BUDHA DAN PEMBINAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan pemantapan terhadap Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila perlu dijaga keutuhan dan kelestarian alam dan lingkungan hidup;
b. bahwa perlu dilakukan peningkatan bimbingan ajaran agama (Kristen) Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dan 33;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
3. Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 1932/ MNPPLH/1980 tentang peran lingkungan hidup dalam bimbingan agama.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi di seluruh Indonesia;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.
- Untuk** : 1. Mengusahakan semaksimal mungkin bimbingan ajaran agama (Kristen) Protestan, Katolik, Hindu dan ' Budha dan pembinaan lingkungan hidup melalui TVRI, RRI/Non RRI/Radio Siaran Pemerintah Daerah, Ceramah-ceramah/Khutbah-khutbah dan berbagai kesempatan lainnya demi terwujudnya pelestarian alam dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya;

3. Melaporkan hasil Instruksi ini kepada atasannya.

Ditetapkan di : Ja k a r t a
Pada tanggal : 21 Maret 1981

Menteri Agama R.I.

Cap/ ttd.

H.Alamsjah Ratu Perwiranegara

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1967**

TENTANG

AGAMA KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA

KAMI PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moral yang kurang wajar terhadap warga Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 29;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXVII/TAPRS/1966 Bab III Pasal 7 dan Penjelasannya Pasal 1 ayat (a);
3. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IN/6/1967;
4. Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1967, jo 16.3 tahun 1966.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Menteri Agama;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Segenap Badan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah.
- Untuk** : Melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina sebagai berikut:
- Pertama** : Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata cara ibadat Cina yang memiliki aspek afinitas kulturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan;
- Kedua** : Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga;
- Ketiga** : Penentuan katagori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadat agama, kepercayaan dan adat

isitiadat Cina diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung (PAKEM);

Keempat : Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Jaksa Agung;

Kelima : Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Desember 1967
Pejabat Presiden Republik Indonesia

Cap/ttd.

Soeharto
Jenderal TNI

Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Kabinet Ampera RI
Pd. Kepala Biro Tata Usaha

Cap. ttd.

Ali Affandi
Let. Kol. Inf. Nrp. 10877

Disalin sesuai dengan salinan aslinya
oleh Staf Biro II,
ttd.

(M. Loekman)

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967
TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
- b. bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, ADAT ISTIADAT CINA.
- PERTAMA** : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA** : Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI,
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I,

ttd.

Lambock V. Nahattands

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1968**

TENTANG

**PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN WARGA
NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
BEBAS DI INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: 1. Bahwa dalam rangka mengatur kegiatan warga negara asing yang bekerja di Indonesia, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Instruksi Presidium Kabinet tertanggal 7 Juni 1967 No. 37/U/IN/6/1967, dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan terhadap warga negara asing yang melakukan pekerjaan besar (*vrije beroepen*) di Indonesia.
2. Bahwa untuk itu, dipandang perlu menunjuk Menteri Tenaga Kerja guna melaksanakan pasal 3 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/ 6/1967
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967;
3. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37U/IN/6/1967;
4. Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1967.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : MENTERI TENAGA KERJA

U n t u k : Melaksanakan pasal 3 Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IN/6/1967, tentang keharusan bagi setiap warga negara asing untuk memiliki izin kerja disamping izin usaha yang sudah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Setiap warga negara asing yang bebeda di I ndonesia termasuk mereka yang melakukan pekerjaan bebas (*vrije beroepen*) dan majikan-majikan berkewarganegaraan asing yang berusaha sendiri, harus memiliki izin bekerja tertulis dari Menteri Tenaga Kerja.

Kedua : Pemberian izin kerja dimaksud pada ketentuan PERTAMA Instruksi ini, diatur sesuai derigan kebutuhan menurut perencanaan dalam bidang pembangunan perekonomian nasional serta dengan tetap mengutamakan pemberian kesempatan bekerja dan berusaha bagi warga negara Indonesia.

Ketiga : Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PJ. Presiden Republik
Indonesia,

C a p / ttd.

S O E H A R T O
Jenderal - TNI.

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1980**

TENTANG

**REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN TENAGA ASING
YANG MELAKUKAN KEGIATAN BIDANG AGAMA
DI INDONESIA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelayanan terhadap tenaga asing yang melakukan kegiatan di bidang agama di Indonesia, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 1978 tentang Pertimbangan/Rekomendasi atas permohonan Rohaniwan/Rohaniwati Warga Negara Asing yang melakukan kegiatan di bidang Agama di Indonesia.

- Mengingat:
1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jo Nomor 30 Tahun 1978 dan Nomor 22 Tahun 1980 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia jo SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 1-2 Tahun 1978.

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. TENTANG REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN TENAGA ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN BIDANG AGAMA DI INDONESIA.

Pertama: Orang asing dapat melakukan kegiatan di bidang agama di Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Agama Republik Indonesia.

Kedua: Untuk memberikan rekomendasi termasuk diktum pertama Menteri Agama Republik Indonesia melimpahkan wewenang kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk, atas nama Menteri Agama/Sekretaris Jenderal Departemen Agama, menandatangani surat rekomendasi tersebut.

Ketiga: Syarat-syarat untuk memperoleh rekomendasi, seperti dimaksud diktum pertama dan kedua harus dilengkapi:

- a. Surat permohonan Referen/Sponsor;
- b. Surat Keterangan Kedutaan RI di Luar Negeri, khusus Permohonan untuk mendapatkan Visa Berdiam Sementara (VBS);
- c. Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);
- d. Surat Keterangan atau ijazah/licence yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah tenaga ahli yang belum dimiliki oleh bangsa Indonesia; di bidang Agama/Rohaniwan-Rohaniwati;
- e. Surat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi yang bersangkutan;
- f. Surat persetujuan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat bersangkutan dengan agama yang dianut oleh Rohaniwan/ Rohaniwati bersangkutan;
- g. Surat Keterangan dari Lembaga Keagamaan di Indonesia yang akan menerima bantuan tenaga Asing yang bersangkutan yang menyatakan batas waktu perbantuan tenaga Asing itu, sesuai dengan Program Pendidikan dan Latihan pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978; dan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1979 pasal 7.
- h. Data Statistik mengenai:
 - 1) Jumlah umat beragama di Daerah Kabupaten/ Kotamadya tempat Rohaniwan/Rohaniwati bersangkutan melaksanakan kegiatan di bidang agama;
 - 2) Jumlah jemaat dari Gereja/Lembaga Keagamaan bersangkutan;
 - 3) Jumlah Rohaniwan/Rohaniwati Warga Negara Asing untuk Gereja/Lembaga bersangkutan.
- i. Surat Keterangan dari aparat keamanan di Daerah mengenai tenaga asing yang bersangkutan khusus bagi pemohon perpanjangan KMAS.

Keempat: Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ sederajat setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dan Badan/Dinas keamanan setempat memberikan persetujuan tertulis seperti dimaksud diktum ketiga.

- Kelima:** Segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Departemen Agama yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- Keenam:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 Agustus 1980

Menteri Agama R.I.

Cap/ ttd.

H. Alamsjah Ratu Perwiranegara

Lampiran IV
Keputusan Menteri Agama Tentang Wadah Mesyuarat Antara Umat
Beragama Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 35 TAHUN 1980

TENTANG

WADAH MUSYAWARAH ANTAR UMAT BERAGAMA

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup diantara sesama umat beragama, demi terciptanya kesatuan dan persatuan Bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila(P4), serta tanggung jawab bersama atas pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), diperlukan suatu Wadah Musyawarah, yaitu suatu Forum Konsultasi dan Komunikasi, antara Pemimpin-pemimpin/Pemuka-pemuka Agama dan antara Pemimpin/Pemuka-pemuka Agama dengan Pemerintah.
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen pada Lampiran 14 jis. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1978, Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1980 tentang perubahan-perubahan dalam Lampiran 14 Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974;
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, yang dalam konsideransnyatelah menampung Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Menteri Agama

Nomor 77 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Memperhatikan : Kesimpulan Pertemuan Penjagaan dan Penambahan Teknis antara Pejabat-Pejabat Departemen Agama dengan Wakil-Wakil Majelis Agama dalam rangka pembentukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama pada tanggal 17-18 Oktober 1979, Pertemuan Kerja tanggal 17 Maret 1980 dan Pertemuan Kerja tanggal 17-18 Juni 1980 dan Pertemuan Tingkat Puncak pada tanggal 30 Juni 1980 di Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG WADAH MUSYAWARAH ANTAR UMAT BERAGAMA.**

Pertama : Menyatakan terbentuknya “WADAH MUSYAWARAH ANTAR UMAT BERAGAMA” yang telah disepakati oleh wakil-wakil Majelis Agama dalam Pertemuan Tingkat Puncak pada tanggal 30 Juni 1980 di Jakarta, dengan PEDOMAN DASAR yang menjadi Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pengeluaran biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada mata anggaran Departemen Agama.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 1980

MENTERI AGAMA RI
Cap/ttd

H. Alamsjah Ratu Perwiranegara

Lampiran V
Jadwal Tentang Jumlah Peratus Pemeluk Agama Menurut Propinsi Tahun
1990 dan 2000

Jadwal: Peratus Pemeluk Agama Menurut Propinsi Tahun 1990 dan 2000

Propinsi	Islam		Kristian Protestan		Katholik	
	1990	2000	1990	2000	1990	2000
1	2	3	4	5	6	7
Nangro Aceh. D	---	---	---	---	---	---
Sumatera Utara	63.24	66.00	28.05	25.03	5.01	4.43
Sumatera Barat	97.57	98.06	1.11	0.55	1.07	1.28
Riau	88.90	89.22	3.75	2.88	1.01	0.93
Jambi	95.97	95.69	1.52	1.23	0.71	0.86
Sumatera Selatan	94.60	95.42	0.98	0.55	1.07	1.34
Bengkulu	97.77	98.45	1.14	0.86	0.75	0.45
Lampung	94.55	95.27	1.30	1.30	1.67	1.68
DKI Jakarta	84.11	85.34	6.18	5.53	4.74	4.71
Jawa Barat	97.50	97.68	1.04	1.05	0.78	0.73
Jawa Tengah	96.31	95.84	1.75	2.15	1.45	1.64
D.I Yogyakarta	90.61	91.35	2.70	2.73	6.25	5.76
Jawa Timur	96.68	97.14	1.59	1.27	0.99	1.01
Bali	8.10	9.17	0.56	0.82	0.49	0.74
NusaTenggara Barat	96.36	95.52	0.26	0.14	0.47	0.43
NusaTenggaraTimur	9.12	8.14	33.16	35.09	52.89	54.06
Kalimantan Barat	55.62	56.51	9.28	10.03	24.28	22.28
Kalimantan Tengah	69.61	74.38	15.91	16.69	2.48	2.51
Kalimantan Selatan	96.63	97.18	1.02	0.87	0.61	0.84
Kalimantan Timur	84.65	83.95	9.39	10.56	4.10	3.97
Sulawesi Utara	47.60	48.33	47.58	47.01	4.04	3.92
Sulawesi Tengah	76.73	79.55	18.07	13.54	1.35	1.25
Sulawesi Selatan	88.51	87.88	7.85	8.45	1.89	1.82
Sulawesi Tenggara	96.21	94.33	1.64	1.82	0.62	0.84
Maluku	-	---	---	---	---	---
Irian Jaya	20.32	19.00	60.05	63.78	19.28	16.98
INDONESIA	87.69	87.91	5.81	5.73	3.24	3.25

Propinsi	Hindu		Buddha		Lainnya	
	1990	2000	1990	2000	1990	2000
1	2	3	4	5	6	7
Nangro Aceh. D	---	---	---	---	---	---
Sumatera Utara	0.19	0.17	3.33	4.31	0.19	0.06
Sumatera Barat	0.03	0.00	0.22	0.10	0.01	0.00
Riau	0.05	0.09	5.80	5.86	0.51	1.01
Jambi	0.05	0.02	1.33	1.88	0.42	0.32
Sumatera Selatan	0.14	0.23	2.01	1.49	1.21	0.97
Bengkulu	0.07	0.15	0.21	0.10	0.05	0.00
Lampung	1.77	1.44	0.64	0.31	0.06	0.00
DKI Jakarta	0.24	0.23	4.65	4.08	0.08	0.11
Jawa Barat	0.04	0.03	0.56	0.47	0.08	0.04
Jawa Tengah	0.10	0.09	0.33	0.24	0.07	0.02
D.I Yogyakarta	0.25	0.09	0.13	0.04	0.07	0.03
Jawa Timur	0.41	0.27	0.29	0.26	0.05	0.05
Bali	90.32	88.05	0.51	1.21	0.02	0.01
Nusa Tenggara Barat	2.57	3.03	0.31	0.88	0.02	0.00
Nusa Tenggara Timur	0.19	0.15	0.04	0.03	4.59	2.55
Kalimantan Barat	0.04	0.08	6.81	8.95	3.09	2.05
Kalimantan Tengah	10.66	5.89	0.12	0.10	0.92	0.42
Kalimantan Selatan	0.43	0.21	0.41	0.24	0.90	0.66
Kalimantan Timur	0.25	0.13	1.06	1.00	0.55	0.39
Sulawesi Utara	0.50	0.39	0.27	0.27	0.13	0.07
Sulawesi Tengah	4.02	4.84	0.56	0.56	0.06	0.26
Sulawesi Selatan	1.01	1.13	0.64	0.64	0.35	0.09
Sulawesi Tenggara	1.44	2.99	0.03	0.03	0.02	0.00
Maluku	-	---		---	---	---
Irian Jaya	0.18	0.10		0.08	0.06	0.06
INDONESIA	1.89	1.79		1.10	0.32	0.21

LAMPIRAN VI

Desposisi Wawancara dengan Direktorat Agama Kristian, Hindu dan Buddha

DEPARTEMEN AGAMA RI.
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU DAN BUDDHA

LEMBAR DISPOSISI

Indeks :	Kode : 21
Tanggal / Nomor :	15 - 2 - 2005
Asal :	Mahasiswa S3 Universitas Malaya
Isi Ringkas :	dan Yohani Yania MA. penelitian wawancara
Diterima Tanggal :	18 - 2 - 2005
Tanggal Penyelesaian :	
Isi disposisi :	Diteruskan kepada :
<p>- siap kes Dohany dan beribah puydasos. sesuai apa yang ditany.</p> <p>21 2005</p>	<p>1. Kereblit 2. Pemberdayan 3.</p>
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan	
Kepada :	
Tanggal :	21 - 2 - 05

LAMPIRAN VI

Desposisi Wawancara dengan Direktorat Agama Kristian, Hindu dan Buddha

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDRAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

LEMBAR DISPOSISI

Indeks :	Kode :
Tanggal/Nomor :	15-2-'05 : -
A s a l :	Yasril Yazid, MA.
Isi Ringkas :	Permohonan Wawancara.
Diterima Tanggal :	18-2-'05
Tanggal penyelesaian :	
Isi disposisi : <div style="text-align: center;"> <p><i>Ditickkan</i></p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p><i>layani</i></p> <p><i>h 21/05</i></p> <p><i>2/2</i></p> <p>Sudah dilayani</p> <p><i>[Signature]</i> <i>21-'05</i></p> </div>	Diteruskan kepada : 1. <i>Bp. Sirjes</i> 2. 3.
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :	
Kepada :	<i>[Signature]</i> <i>21.2.2005</i>
Tanggal :	